

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Susanto. (2018). *Pengantar: Pengelolaan Kota Ramah Air Melalui Pendekatan Water Metabolism City Untuk Menunjang Pembangunan Kota Berkelanjutan*. Seminar Nasional FMIPA Universitas Terbuka.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashofa. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadiati Koeswadji Hermin. (1993). *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Knut D. Asplund, dkk, 2008. *Hukum Hak Azasi manusia*, Jogjakarta : PUSHAM UII.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). (2019). *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Jakarta: LBHM.
- Majda El Muhtaj, 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridha Shaleh, 2005 *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Walhi.
- Sanin Bunasor. (2011). *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Menopang Negara Mandiri dan Berdaulat*. Jakarta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- _____. *Sumber Daya Air dan Kesejahteraan Publik*. Jakarta: Penerbit Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisno. (2002). *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tri Joko. (2009). *Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum*. Semarang: UNDIP.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 atas pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Bagian Pendapat.

C. Jurnal, Skripsi, dan lain-lain

Kinney, Eleanor D., 2006. *The International Human Rights to Health*, Indiana Law Review, Volume 34.

Firdaus, F. Hardianto, WT. Maser (2017). *Strategi PDAM Dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih Untuk Menunjang pembangunan di Kota Wisata (Studi Pada Kantor PDAM Kota Batu*. Jurnal Volume 6 Nomor 2 ISSN Cetak: 2442: 6992, hlm. 10.

Nugroho, Jati. (2019). *Pergeseran Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengaruhnya Terhadap Pengakuan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Prinsip Keadilan (Perspektif Sejarah Hukum)*. Jurnal Transparansi Hukum: P- ISSN 2613-9200, E-ISSN 2613-9197, hlm. 69.

Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Bagian II Pasal 2, Ayat 1.

Komentar Umum Nomor 16 Pasal 11 dan 12 Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, hlm. 198-199.

Sutrisno. (2011). *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum, No. 3, hlm. 445-446.

D. Sumber Lainnya

Global Climate Change. www.unesco.org.

Rochmi MN. (2016). *Akses Air Bersih Masih Jauh Dari Target*. <https://beritagar.id/Artikel/Editorial/Hapuskan-Perda-Penyebab-Ekonomi-Biaya-Tinggi>.

